

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Selain pengertian tersebut, korupsi juga dapat diartikan suatu tindakan yang sangat tidak terpuji dan dapat merugikan suatu bangsa. Korupsi dalam praktiknya, memiliki beragam makna. Sejumlah pakar dari berbagai disiplin ilmu bersilang pendapat untuk merumuskan pengertian yang paling memadai. Seorang pejabat dikatakan korupsi apabila ia menerima hadiah dari seseorang agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan sang pemberi hadiah. Meminta hadiah atau balas jasa karena terlaksananya suatu tugas yang sebenarnya adalah kewajiban, istilah korupsi kadang juga dikenakan pada pejabat yang menggunakan uang negara yang berada di bawah pengawasannya untuk kepentingan pribadi.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rajardjo mengatakan, pertumbuhan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia paling tinggi dibandingkan negara-negara lain di dunia. Pada awalnya, Agus terlebih dulu memaparkan IPK Indonesia yang terendah di ASEAN pada tahun 1998. Agus memaparkan, IPK Indonesia waktu itu sebesar 20, Filipina sebesar 33, Thailand sebesar 30 dan Malaysia mencapai skor 53. Sementara IPK Singapura, lanjut Agus, sudah meningkat lebih jauh dari negara kawasan. Namun seiring

perkembangan, Agus melihat, IPK Indonesia mengalami pertumbuhan yang tinggi meskipun belum ideal. Menurut Agus, capaian IPK Indonesia saat ini tak lepas dari kerja keras seluruh pihak sejak pemerintahan Indonesia mulai dari era mantan Presiden BJ Habibie hingga Presiden Joko Widodo saat ini (Kompas,2018).

Pengertian korupsi menurut masyarakat awam khususnya adalah suatu tindakan mengambil uang negara agar memperoleh keuntungan untuk diri sendiri. Akan tetapi menurut buku yang menjadi referensi bagi penulis pengertian korupsi sendiri yang juga dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian korupsi sebagai berikut :”penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain)”.

Ditemukannya berbagai macam kasus korupsi yang menyeret pejabat publik dalam instansi pemerintahan menjadikan citra Indonesia menurun dalam dunia internasional. Terbukti dengan terungkapnya kasus korupsi yang terjadi di dalam pemerintahan, negara mengalami kerugian yang tidak sedikit. Keterlibatan pejabat publik dalam melakukan tindakan korupsi membuat pelayanan negara dalam melayani masyarakatnya tidak dapat berjalan dengan maksimal.

Fraud atau kecurangan merupakan penipuan yang disengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Kecurangan umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut. Kecurangan itu sendiri secara umum merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang

dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain. Orang awam seringkali mengasumsikan secara sempit bahwa *fraud* sebagai tindak pidana atau perbuatan korupsi (Anisa,2016).

Kasus - kasus kecurangan atau korupsi sering diberitakan di Indonesia, pada tahun 2018 KPK menangani 178 kasus korupsi. Sebanyak 152 di antaranya adalah kasus penyuapan, contohnya seperti Bupati Jepara Ahmad Marzuki Ia diduga menyuap hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, Lasito sebesar Rp 700 juta. Tidak sedikit pula nominal yang dilahap para koruptor yang sangat merugikan negara. Kasus korupsi sangat menodai citra institusi sektor pemerintahan yang harusnya menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas kepada masyarakat luas. Platform utama yang umum untuk menyoroti kasus korupsi di kalangan pegawai di sektor pemerintahan ini adalah media. Sudah menjadi hak publik untuk diberi tahu mengenai bagaimana pihak berwenang mengelola aset publik dan apakah pegawainya telah menyalahgunakan tanggung jawab mereka. Paparan semacam itu dapat memaksa badan-badan yang terlibat untuk memantau aktivitas pegawai mereka secara ketat dan menggunakan tindakan pencegahan yang efektif untuk mencegah kejadian tersebut berulang.

Pada penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan Aishah (2017) tentang pemberitaan kasus-kasus korupsi di Malaysia melalui empat surat kabar umum dalam dua Bahasa yaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggris. Aishah (2017) menyimpulkan bahwa surat kabar Bahasa Inggris melaporkan kasus korupsi lebih tinggi yang melibatkan pegawai sektor publik dari pada surat kabar Malaysia itu

sendiri selama tahun 2016 dan berhasil mengumpulkan sebanyak 603 berita dari empat surat kabar. Media tertinggi yang melaporkan kecurangan adalah kasus penipuan yang melibatkan Departemen Air Sabah (SWD), sementara kasus kecurangan tertinggi dilaporkan di antara pemerintah negara bagian, diikuti oleh pemerintah federal dan pemerintah daerah. Dalam penelitian yang dilakukan Amalia (2018) menyimpulkan bahwa surat kabar terbesar di Indonesia yakni Kompas.com melaporkan korupsi adalah yang paling banyak dilaporkan dan menarik perhatian publik yang mengamatinnya dan ikuti perkembangan setiap kasus. Berita korupsi E-KTP adalah kasus terbesar dan paling banyak dilaporkan selama 2017, melibatkan banyak tokoh populer di Kementerian Dalam Negeri di Jakarta Pemerintah Indonesia. Sedangkan pada penelitian ini melakukan penelitian tentang topik yang sama namun menambah tahun sampe dengan tahun 2018.

Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti bermaksud melakukan penelitian yang berjudul: **Penggambaran Tindak Kecurangan Pada Sektor Publik Melalui Pemberitaan Media di Indonesia Tahun 2017-2018.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikemukakan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pola pemberitaan media mengenai berita korupsi pada sektor pemerintahan?
2. Seberapa tinggi frekuensi pemberitaan media mengenai berita korupsi pada sektor pemerintahan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui jenis media yang memberitakan berita korupsi pada sector pemerintahan di Indonesia.
2. Mengetahui seberapa tinggi frekuensi pemberitaan berita korupsi pada sektor pemerintahan di Indonesia.
3. Mengetahui pola pemberitaan berita korupsi pada sektor pemerintahan.

1.4 Manfaat Penelitian

Harapan penelitian ini dapat bermanfaat untuk :

- 1) Bagi akademisi, sebagai kontribusi pada literatur-literatur terdahulu mengenai pola pemberitaan berita korupsi yang marak di beritakan dimedia di Indonesia.
- 2) Bagi pembaca diharapkan penelitian ini dapat manambah wawasan, pengetahuan dan gambaran yang jelas sejauh mana tercapai keselarasan antara pengetahuan secara teoritis dan praktiknya.

- 3) Bagi penelitian yang akan datang, sebagai acuan terutama penelitian yang berkaitan dengan pemberitaan media mengenai kecurangan pada sektor publik di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang terjadinya masalah, batasan masalah/fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang penjabaran dan pengertian mengenai teori-teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini serta penjabaran mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang dapat membantu penulis dalam melakukan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang alasan penulis menggunakan metode kualitatif, alasan dalam memilih tempat penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta pengujian keabsahan data yang digunakan penulis dalam penelitiannya.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil analisis dan pembahasannya. Bagian ini memuat semua temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian. Hasil analisis digunakan penulis untuk menjawab rumusan permasalahan berdasarkan pada telaah teoritik dan metodologi yang telah ditetapkan sebelumnya.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan dalam penelitian, dan saran dari penulis.

